

**PEMERINTAH KABUPATEN
BALANGAN**



**RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat ALLAH SWT karena atas berkat RahmatNya, penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, oleh karena itu sumbang saran dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah demi kemajuan Kabupaten Balangan yang kita cintai sangat kami hargai.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah demi kemajuan Kabupaten Balangan.

Paringin, Januari 2022

**Pt KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



H. RAHMI, S.H.I
Pembina / IVa

NIP. 19761107 198903 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	li
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangkat Daerah	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	31
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	31
3.3 Program dan Kegiatan	
BAB IV RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH	41
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana kerja Tahunan BPBD Kabupaten Balangan merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan BPBD Balangan dalam periode tahun anggaran 2022.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan BPBD Balangan Tahun 2022 memuat program dan kegiatan yang akan di laksanakan oleh BPBD Balangan pada tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan.

Semua dokumen perencanaan memiliki keterkaitan yang erat satu sama lainnya. SKPD menyusun Rencana Strategis (Renstra – SKPD) yang memuat visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Penyusunan Renstra – SKPD di maksud berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran RPJMD dengan menggunakan bahan Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun mengaju pada Renja Pemerintah. Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun – tahun sebelumnya. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan. Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (RKUA) dan PPAS di dasarkan pada RKPD yang telah disusun sebelumnya, yang kemudian RKUA dan RPPAS inilah yang menjadi landasan penyusunan RAPBD.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor : 73 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana yang meliputi :

- a. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- b. Kedaruratan dan Logistik; dan
- c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien.
- .b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

1.2 Landasan hukum

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kaliman Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265) ;
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang – undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Presiden Nomo33 Tahun 2021Tentang Standar Satuan Harga Regional.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;Sebagaiman telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 .

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian , dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Perubahan Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Renca Kerja Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklator Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah .
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2022.
20. Kepmendagri 050 -5889 Tahun 2021 Pementakhiran Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah .
21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
24. Peraturan Bupati Balangan Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas BPBD.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan tahun 2022 :

- 1) Menyelaraskan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan tahun 2022 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;
- 2) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
- 4) Memberikan arah dan sekaligus tolak ukur keberhasilan kegiatan.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan tahun 2022 :

- 1) Terwujudnya dokumen Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan Penanggulangan Bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
- 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana;
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana penanggulangan bencana

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Program dan Kegiatan RKPD BPBD Balangan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan RKPD BPBD Balangan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah:

1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA :

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

2. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN:

- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran;
- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran.

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH: :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tahun Anggaran 2021, BPBD Kabupaten Balangan mengelola anggaran belanja program kegiatan sebesar Rp. **7,719,795,480,-** (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2,643,538,758,- (Dua Milyar Enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dan Belanja Langsung Rp. 4.576.256.722,- (Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)

Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembiayaan 3 (tiga) program dengan 12 (dua belas) kegiatan. Realisasi anggaran belanja langsung terealisasi sebesar 86 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.931.548.369,- (Tiga Milyar Sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan)

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD sampai dengan triwulan IV Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD Tahun 2021 sampai dengan triwulan IV dapat disampaikan bahwa hasil capaian kinerja 3 Program 12 kegiatan dan 30 Sub kegiatan dengan Indikator :



TABEL TC 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)* Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : ... Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan-Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target program dan kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	01								
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
		Tingkat kelancaran pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2	01						
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
		Jumlah dokumen penganggaran, laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	30 Dokumen	0	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	10 Dokumen	33%
1	05	01	2	01	06					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Dokumen	0	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	10 Dokumen	33%
1	05	01	2	02						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
		tingkat kelancaran pelayanan Administrasi perangkat daerah	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2	02	01					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	84 Bulan	0	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	28 Bulan	33%
1	05	01	2	01	05					
		Kordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun								
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	6 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	33%

1	05	01	2	01	07	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/semester	Jumlah laporan keuangan bulanan atau semesteran	12 Dokumen	0	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	33%	
1	05	01	2	05		Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Presentase sumber daya aparatur yang mendapat peningkatan disiplin dan kapasitas	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	276 stel	0	46 stel	46 stel	100%	46 stel	92 Stel	33%	
1	05	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang undangan	40 Orang	0	40 Orang	40 Orang	100%	0	40 Orang	100%	
1	05	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	0	20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang	40 Orang	33%	
1	05	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	TINGKAT KELANCARAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang diadakan	72 Bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 Bulan	33%	
1	05	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 Buah	0	5 Buah	5 Buah	100%	5 Buah	10 Buah	33%	
1	05	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	72 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 Buah	33%	
1	05	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	72bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 Buah	33%	
1	05	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat dan Kordinasi Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	540 Kali	0	90 Kali	90 Kali	100%	90 Kali	180 Kali	33%	

1	05	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang / aset yang diadakan	6 Unit	0	2 unit	2 unit	100%		2 Unit	33%	
1	05	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang diadakan	6 Unit	0	2 unit	2 unit	100%	0	2 Unit	0
1	05	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	0	0	0	0	0	0	0
1	05	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat	72 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 Bulan	33%
1	05	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 Bulan	33%
1	05	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	6 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	33%
1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tingkat pelayanan jasa perkantoran	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang mendapat pemeliharaan rutin atau berkala dan perijinan kendaraan dinas atau operasional	72 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 Bulan	33%
1	05	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	72 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 Bulan	33%
1	05	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin atau berkala	0	0	-	-	-	12 bulan	12 Bulan	0
1	05	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Penyediaan jasa kebersihan kantor	72 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 Bulan	33%

1	05	03					PROGRAM PENUNGGULANGAN BENCANA	Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	03	2	01			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	0	100%	100%	100%	80 Desa			0,00%
1	05	03	2	01	01		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah wilayah berpotensi bencana yang terpantau	400 Desa	0	20 Desa	10 Desa	50%	40 Desa	50 Desa		12,50%
1	05	03	2	01	02		Sosialisai, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah Wilayah Berpotensi Bencana yang Mendapatkan Informasi tentang rawan bencana	400 Desa	0	20 Desa	20 Desa	100%	40 desa	60 Desa		15%
1	05	03	2	02			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlatihnya Aparatur Yang menangani sub urusan bencana dan warga yang berada dikawasan rawan bencana	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%		100%
1	05	03	2	02	04		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	6 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket		33%
1	05	03	2	02	05		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Bencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	6 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen		17%
1	05	03	2	02	07		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100%	0	86.634 meter	100%	100%	100%	100%		100%

1	05	03	2	02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Anggota TRC	12 kegiatan	0	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	4 Kegiatan	17%
1	05	03	2	03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	90 paket	0	40 Paket	30 Paket	75%		30 Paket	33%
1	05	03	2	03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan logistik yang tersalurkan kepada korban bencana	390 paket	0	40 Paket	30 Paket	75%	50 paket	80 Paket	20%
1	05	04				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana dan Prosentase Desa Siaga Bencana	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	04	2	01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	75 Kegiatan	0	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100%	15 Kegiatan	25 Kegiatan	33%
1	05	04	2	01	02	Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan dan pelatihan tentang penanganan bencana kebakaran	75Kegiatan	0	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100%	15 Kegiatan	25 Kegiatan	33%
1	05	04	2	04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tersedianya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1200 Orang	0	200 Orang	200 Orang	100%	200 Orang	400 Orang	33%
1	05	04	2	04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Bencana Kebakaran yang Tertangani	200 Orang	0	200 Orang	200 Orang	100%	200 Orang	400 Orang	33%

2.2 ANALIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja BPBD Kabupaten Malang belum sepenuhnya 100%. Hal ini dikarenakan Kabupaten Balangan merupakan salah satu daerah rawan bencana, khususnya banjir dan tanah longsor. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang bencana terutama di daerah-daerah rawan bencana, untuk itu diperlukan penjelasan dalam bentuk pelatihan maupun sosialisai kebencanaan. Perlu kesadaran masyarakat Kabupaten Balangan yang hidup di daerah rawan bencana untuk dapat hidup berdampingan dengan bencana tanpa menimbulkan atau meminimalkan dampak korban bencana.

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Indikator Kinerja utama (IKU) terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD
Kabupaten Balangan

NO	Indikator	SPM	IKK	NSPK / Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan		14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	
5	Kordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah laporan keuangan akhir tahun		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
6	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/semester		Jumlah laporan keuangan bulanan atau semesteran		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
Kegiatan Administrasi Keparawalan Perangkat Daerah													
7	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakalan dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		46 Stel	46 Stel	46 Stel	46 Stel	46 Stel	46 Stel	46 Stel	60 Stel	
8	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang undangan		40 Peserta	40 Peserta	40 Peserta	40 Peserta	20 Peserta	40 Peserta	40 Peserta	40 Peserta	
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan		Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	60 Orang	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah													

22	Pemeriharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	3 Unit	1 Unit	1 Unit	
21	Pemeriharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Penyediaan jasa kebersihan kantor		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
Program Penanggulangan Bencana												
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota												
23	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah wilayah berpotensi bencana yang terpantau		20 Desa	40 Desa	60 Desa	80 Desa	5 Desa	40 Desa	60 Desa	80 Desa	
24	Sosialisai,Komunikasi,Infor masi,Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah Wilayah Berpotensi Bencana yang Mendapatkan Informasi tentang rawan bencana		20 Desa	40 Desa	60 Desa	80 Desa	20 Desa	40 Desa	60 Desa	80 Desa	
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana												
25	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket dan 2 Kegiatan, 30 Peralatan dan 25 Peralatan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
26	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Bencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
27	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		86.634 Meter	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
28	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Anggota TRC		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
29	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				100 orang	150 orang			100 orang	150 orang	

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana												
30	Respon Cepat darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPOB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat			1 Dokumen	3 Dokumen				1 Dokumen	3 Dokumen	
31	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan logistik yang tersalurkan kepada korban bencana		40 Paket	50 Paket	60 Paket	70 Paket	40 Paket	50 Paket	60 Paket	70 Paket	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran												
Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota												
32	Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Kebakaran yang Tertangani		10 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	10 Kegiatan	
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran												
33	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan dan pelatihan tentang penanganan bencana kebakaran		200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	



2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dengan kedudukan dan fungsinya BPBD memiliki lingkup pelayanan yang luas. Kabupaten Balangan adalah daerah yang rawan bencana, namun sulit untuk mengukur kinerja pelayanan BPBD dalam penganggulangan bencana. Karakteristik satu jenis bencana berbeda dengan bencana yang lain sehingga penanganannya berbeda. Selain itu, bencana merupakan hal yang rumit dan tidak dapat di[rediksi dengan pasti. Salah satu kinerja yang dapat diukur dan tidak dapat diukur pada tahun 2022 adalah jumlah desa Tangguh bencana yang telah diinisiasi dan dibentuk oleh BPBD maupun pihak lain yaitu keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha media massa maupun akademisi dalam program penanggulangan bencana. Dari 75 desa rawan bencana baru ada 1 desa tangguh bencana. Dengan berbagai strategi yang ada diharapkan pada tahun 2023, sebanyak 75 desa rawan bencana telah terbentuk menjadi desa tangguh bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan sebuah OPD yang memiliki tugas dan fungsi yang besar tetapi minim kewenangan. Bencana berimplikasi terhadap semua sector, oleh sebab itu upaya pengurangan resiko bencana; penanganan tanggap darurat, penanganan pasca bencana harus dilakukan di semua sektoe pemerintahan, swasta/dunia usaha dan masyarakat. Harus dan tidak boleh di tawar, penanggulangan bencana tidak boleh dibebankan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah semata. Penanggulangan bencana dibebankan kepada segenap OPD di Pemerintah Daerah, Pemerintah Swasta/korporasi dan masyarakat itu sendiri.

Sedangkan beberapa hal yang menjadi kelemahan dan ancaman Badan Penanggulanagan Bencana Daerah Kabupaten Balangan antara lain:

- Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Kementerian/Instansi selain Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia;
- Adanya keterbatasan sarana komunikasi di kecamatan dan desa sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke Kabupaten;
- Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan Kebencanaan.

Namun demikian kondisi ekonomi diwilayah Kabupaten Balangan 2021-2026 yang diperkirakan akan cenderung stabil bahkan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan komitmen pemerintahan daerah dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Balangan yang Tangguh menghadapi bencana, BPBD Kabupaten Balangan terus berusaha meningkatkan

kualitas dan kuantitas pelayanan penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya.

2.4 REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Renja Perangkat Daerah yang merupakan penuangan dari Renstra Perangkat Daerah atau sebagai turunan dari RKPD yang merupakan penuangan dari RPJMD Kabupaten, adalah sebuah runtutan proses atau alur mekanisme perencanaan yang harus disusun sebagai sebuah Dokumen Perencanaan. Berdasarkan uraian tersebut, berarti rancangan awal RKPD sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam RPJMD Kabupaten. Adapun secara keseluruhan kebutuhan anggaran untuk Belanja tahun 2022 menurut rancangan awal RKPD adalah Rp. 9.866.630.897,- (sembilan Milyar delapan Ratus enam puluh enam Juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah). Sedangkan menurut hasil analisis kebutuhan adalah sebesar Rp. Rp. 8.216.106.897,- (Delapan Milyar dua Ratus enam belas Juta seratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) termasuk belanja gaji dan tunjangan PNS.

Bila ditotal berdasarkan berdasarkan Program / Kegiatan Rencana Awal Renja 2022, maka Usulan Pagu Anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sebesar Rp. Rp. 4.492.385.287,- (Empat Milyar empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh Rupiah), Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 4.783.946.610,- (Empat Milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus sepuluh Rupiah) dan Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dallm Daerah Kabupaten / Kota sebesar Rp. 590.299.000,- (Lima ratus Sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perencanaan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan pada Perubahan RKPD taun 2022 yang telah disusun, Review terhadap Rancangan Awal RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan dalam table berikut :

Cek table pak tahunnya masih 2023

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	BPBD Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 Dokumen	21.339.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	BPBD Balangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 Dokumen	21.339.000			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	BPBD Balangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	BPBD Balangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	6.000.000			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	118.480.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	118.480.000			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Balangan	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	4,418,570,155	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Balangan	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	3,761,783,085			
Kordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun	BPBD Balangan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	10,000,000	Kordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun	BPBD Balangan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	10,000,000			

	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/semester	BPBD Balangan	Jumlah laporan keuangan bulanan atau semesteran	2 Dokumen	46,800,000	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/semester	BPBD Balangan	Jumlah laporan keuangan bulanan atau semesteran	2 Dokumen	46,800,000	
Administrasi Kepagawalan Perangkat Daerah						Administrasi Kepagawalan Perangkat Daerah					
	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPBD Balangan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	46 Stel	45,000,000	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BPBD Balangan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	46 Stel	45,000,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	BPBD Balangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	272,378,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	BPBD Balangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	272,378,000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD Balangan	Jumlah komponen Instalasi Listrik atau penerangan bangunan kantor yang diadakan	12 Bulan	13,275,100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPBD Balangan	Jumlah komponen Instalasi Listrik atau penerangan bangunan kantor yang diadakan	12 Bulan	13,275,100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD Balangan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Buah	222,978,900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BPBD Balangan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Buah	256,172,900	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	BPBD Balangan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan		44,045,300	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	BPBD Balangan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	44,045,300
	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	BPBD Balangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	11,995,200	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	BPBD Balangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	11,995,200	

Penyelenggaraan Rapat dan Kordinasi Konsultasi SKPD	BPBD Balangan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	90 Kali	194,508,600	Penyelenggaraan Rapat dan Kordinasi Konsultasi SKPD	BPBD Balangan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	90 Kali	172,604,000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD Balangan	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang diadakan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD Balangan	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang diadakan			
Pengandaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPBD Balangan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	424,845,300	Pengandaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BPBD Balangan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	-	213,821,500	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD Balangan	waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	193,383,600	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPBD Balangan	waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	193,383,600	
Penyediaan Jasa Konunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD Balangan	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	125,795,000	Penyediaan Jasa Konunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	BPBD Balangan	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	125,795,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD Balangan	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	1 Paket	100,186,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPBD Balangan	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	1 Paket	100,186,600	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Penyedion Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD Balangan	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang mendapat pemeliharaan rutin atau berkala dan perijinan kendaraan dinas atau operasional	12 Bulan	298,628,488	Penyedion Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan ,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD Balangan	Jumlah kendaraan dinas atau operasional yang mendapat pemeliharaan rutin atau berkala dan perijinan kendaraan dinas atau operasional	12 Bulan	298,628,488	

Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	BPBD Balangan	Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	16,000,000	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	BPBD Balangan	Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	16,000,000	
Pemeriharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD Balangan	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin atau berkala		168,080,000	Pemeriharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD Balangan	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin atau berkala		218,180,000	
Pemeriharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD Balangan	Waktu Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	139,970,800	Pemeriharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BPBD Balangan	Waktu Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	110,930,800	
Program Penanggulangan Bencana					Program Penanggulangan Bencana					
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten /Kota	BPBD Balangan	Jumlah wilayah berpotensi bencana yang terpantau	60 Desa	109,450,000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten /Kota	BPBD Balangan	Jumlah wilayah berpotensi bencana yang terpantau	60 Desa	192,190,000	
Sosialisai,Komunikasi ,Informasi,Edukasi (KIE) Rawan Bencana	BPBD Balangan	Jumlah Wilayah Berpotensi Bencana yang Mendapatkan Informasi tentang rawan bencana	60 Desa	744,940,000	Sosialisai,Komunikasi ,Informasi,Edukasi (KIE) Rawan Bencana	BPBD Balangan	Jumlah Wilayah Berpotensi Bencana yang Mendapatkan Informasi tentang rawan bencana	60 Desa	121,705,800	
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD Balangan	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Paket	1,456,864,250	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD Balangan	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Paket	145,098,200	

	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	Jumlah Dokumen Bencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	1 Dokumen	62,713,200	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	Jumlah Dokumen Bencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	1 Dokumen	89,999,800	
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100%	523,585,400	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100%	523,585,400	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	2 Kegiatan	1,248,046,600	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	2 Kegiatan	1,688,069,400	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD Balangan	jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 orang	147,204,600	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BPBD Balangan	jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 orang	413,980,300	
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					
	Respon Cepat darurat Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	91,100,000	Respon Cepat darurat Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	91,100,000	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	Jumlah Bantuan logistik yang tersalurkan kepada korban bencana	60 Paket	509,800,000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	Jumlah Bantuan logistik yang tersalurkan kepada korban bencana	60 Paket	499,800,000	

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					
Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					
Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	Jumlah Bencana Kebakaran yang Tertangani	15 Kegiatan	1,000,121,300	Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	Jumlah Bencana Kebakaran yang Tertangani	15 Kegiatan	1,000,121,300	
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	BPBD Balangan	Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan dan pelatihan tentang penanganan bencana kebakaran	200 Orang	113,443,500	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	BPBD Balangan	Jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan dan pelatihan tentang penanganan bencana kebakaran	200 Orang	129,937,900	



2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM dan KEGIATAN MASYARAKAT

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Balangan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Mekanisme perencanaan pembangunan telah dirancang agar dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga dalam proses penyusunan rencana pembangunan telah ditempuh melalui beberapa mekanisme usulan, yaitu kegiatan musrenbang, aspirasi langsung kepada Kepala Pelaksana saat kunjungan ke lapangan, aspirasi melalui hasil Reses DPRD, dll.

Dan untuk Renja Murni tahun 2022 tidak ada usulan Pokir maupun musrenbang yang masuk ke dalam DPA BPB

Seiring dengan keterbukaan informasi publik, dan pemanfaatan teknologi informasi, Pemerintah Kabupaten Balangan membuka beberapa sarana untuk membangun sinergi dan komunikasi pembangunan dengan masyarakat. Kanal yang dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Balangan antara lain melalui media social (facebook, instagram, dll). Meskipun terhubung secara struktur, BPBD Kab. Balangan juga mempunyai kanal tersendiri melalui berbagai media yang dimanfaatkan untuk jalur komunikasi dua arah sehingga penanganan bencana di Kabupaten Balangan dapat berjalan dengan efektif, efisien, cepat, tanggap.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam RPJMN IV (2020-2024) diamanatkan bahwa bencana merupakan salah satu dari 7 agenda pembangunan dalam kerangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Tidak dapat dipungkiri bahwa bencana pada saat ini telah menjadi isu nasional dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam program pembangunan nasional. Hal ini terjadi karena bencana dapat menghambat bahkan memundurkan program pembangunan yang dilaksanakan. Pembangunan tanpa memperhatikan aspek pengurangan resiko bencana akan menjadikan sia-sia saat bencana terjadi. Pembangunan infrastruktur saat ini juga akan memberikan penekanan pada pengarusamaan ketangguhan bencana, kesetaraan gender, tata Kelola pemerintah yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta modal dan sosial budaya. Melalui kerangka pembangunan infrastruktur tersebut, tujuan pembangunan nasional menuju negara yang Makmur dan sejahtera dapat terwujud.

Untuk mendukung RPJMN tersebut, sudah selayaknya Pemerintah Daerah selalu memperhatikan aspek kebencanaan dalam pembangunan serta memberikan pemahaman dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana, mengajak dan menggali potensi serta peran masyarakat/dunia usaha dalam penanganan bencana serta mendukung infrastruktur tangguh bencana dalam program pasca bencana.

Dalam Rencana Strategisnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki visi, yaitu : *“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”*. Misi yang dijalankan untuk mencapai Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana.
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal.
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh BNPB selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana.

2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Dengan melihat Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana, adanya penekanan yang berkaitan dengan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya

penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (stakeholders). Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat.

Kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dituangkan dalam renstra dan memberikan pengaruh terhadap BPBD Kabupaten Balangan adalah yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergitas penanggulangan bencana. Koordinasi penanggulangan bencana berkaitan dengan permasalahan koordinasi yang melibatkan Kabupaten lain terutama yang secara geografis posisinya berbatasan dengan Kabupaten Balangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sejalan dengan Visi pembangunan Kabupaten Balangan sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Balangan “MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA, MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”, tujuan yang akan dicapai BPBD Kab. Balangan adalah

1. Mengurangi dan mencegah terjadinya bencana.
2. Memberikan perlindungan, rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.
3. Meningkatkan pengurangan risiko bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana.
4. Pemberian bantuan kepada para korban bencana secara cepat dan tepat sasaran.
5. Meningkatkan pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana.

sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata cara pencegahan dan penanggulangan bencana dan efektif dan efisien.
2. Memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya dan penanggulangan bencana.
3. Terciptanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi lain yang terkait dengan usaha mengurangi bencana.
4. Terwujudnya penanganan korban bencana secara cepat dan tepat.
5. Tersalurkannya bantuan bencana secara tepat.
6. Terwujudnya rehabilitasi sarana dan prasarana pasca bencana.

7. Terwujudnya rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana.

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategik. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai cara untuk mencari sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan pemerintah dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023													
Kabupaten Balangan													
Nama Perangkat Daerah : BPBD													
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
1	05	01											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
1	05	01	201										
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
1	05	01	201	06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD Balangan	5 Dokumen	152.121.112	APBD		5 Dokumen	160.000.000
1	05	01	202										
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
1	05	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Balangan	14 Bulan	2.769.092.787,00	APBD		14 Bulan	4.400.000.000
1	05	01	202	07	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/semester	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	BPBD Balangan	2 Dokumen	9.600.000	APBD		2 Dokumen	11.000.000
1	05	01	202	05	Kordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	BPBD Balangan	1 Dokumen	36.142.560	APBD		1 Dokumen	51.000.000
1	05	01	205										
Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah													
1	05	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	BPBD Balangan	1 Paket	11.700.000	APBD		2 Paket	20.000.000
1	05	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPBD Balangan	50 Orang	84.450.000	APBD		70 Orang	150.000.000

1	05	01	2.05	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	05	01	2.05	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Paket komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang	BPBD Balangan	2 paket	13.949.400	APBD	3 paket	17.000.000
1	05	01	2.05	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	BPBD Balangan	5 Paket	167.045.250	APBD	5 Paket	245.000.000
1	05	01	2.05	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	BPBD Balangan	3 Paket	21.930.950	APBD	4 Paket	49.000.000
1	05	01	2.05	06	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	BPBD Balangan	1 Paket	21.850.000	APBD	1 Paket	14.000.000
1	05	01	2.05	09	Penyelenggaraan Rapat dan Kordinasi Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BPBD Balangan	90 Laporan	45.848.000	APBD	90 Laporan	114.000.000
1	05	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas atau operasional yang	BPBD Balangan	4 unit		APBD	12 Unit	360.000.000
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	BPBD Balangan	2 Unit	424,845,300	APBD	2 Unit	465.000.000
1	05	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	BPBD Balangan	12 Laporan	274.363.492	APBD	12 Laporan	213.000.000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	BPBD Balangan	12 Bulan	152.500.000	APBD	12 Bulan	137.000.000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	BPBD Balangan	1 Laporan	60.448.080	APBD	1 Laporan	110.000.000
1	05	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BPBD Balangan	24 Unit	272.022.000	APBD	35 Unit	318.000.000
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	BPBD Balangan	30 Unit	14.250.000	APBD	50 Unit	17.600.000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	BPBD Balangan	1 Unit	0	APBD	2 Unit	184.000.000
1	05	01	2.09	11	Pemeriharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPBD Balangan	2 Unit	389.071.656	APBD	3 Unit	152.000.000
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana									
1	05	03	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	BPBD Balangan	1 Dokumen	109.999.850	APBD	1 Dokumen	120.000.000

1	05	03	2.01	02	Sosialisai, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	BPBD Balangan	1200 orang	100.000.000	APBD		1500 orang	614.000.000
1	05	03	2.02		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	BPBD Balangan	1 Paket	343.751.350	APBD		1 Paket	1.556.000.000
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	BPBD Balangan	1 Dokumen	1.740.523.700	APBD		1 Dokumen	70.000.000
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	BPBD Balangan	1 Dokumen	168.427.470	APBD		1 Dokumen	576.000.000
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	BPBD Balangan	40 orang	2.040.647.600	APBD		70 orang	1.370.000.000
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	BPBD Balangan	100 Orang	0	APBD		100 Orang	45.000.000
1	05	03	2.03		A								
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	BPBD Balangan	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	100.000.000
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD Balangan	100 Orang	280.596.640	APBD		150 Orang	560.000.000
1	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran								
1	05	04	2.01		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah								
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	20 Laporan	573.369.000	APBD		30 Laporan	1.110.000.000
1	05	04	2.04		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	BPBD Balangan	200 Orang	16.930.000	APBD		200 Orang	125.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA, PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DAN ANALISIS DAMPAK SOSIAL

4.1 RENCANA KERJA, PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tentunya dilakukan dengan menetapkan langkah-langkah strategis, untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan perlu menetapkan strategi dan kebijakan agar pelaksanaan program dan kegiatan menjadi terarah dan terpadu.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati. Adapun Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan juga akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang untuk di jadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Strategi dan Kebijakan yang di tetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022.

TABEL RUMUSAN RENCANA PROGRAM

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023												
Kabupaten Balangan												
Nama Perangkat Daerah : BPBD								lembar dari				
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1												
1	05	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
1	05	01	201	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1	05	01	201	06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPBD Balangan	5 Dokumen	152.121.112	APBD	5 Dokumen	160.000.000
1	05	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1	05	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BPBD Balangan	14 Bulan	2.765.092.787,00	APBD	14 Bulan	4.400.000.000
1	05	01	202	07	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/semester	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	BPBD Balangan	2 Dokumen	9.600.000	APBD	2 Dokumen	11.000.000
1	05	01	202	05	Kordinasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	BPBD Balangan	1 Dokumen	36.142.560	APBD	1 Dokumen	51.000.000
1	05	01	205	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah								
1	05	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	BPBD Balangan	1 Paket	11.700.000	APBD	2 Paket	20.000.000
1	05	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPBD Balangan	50 Orang	84.450.000	APBD	70 Orang	150.000.000

1	05	01	206	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1	05	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Paket komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang	BPBD Balangan	2 paket	13.949.400	APBD		3 paket	17.000.000
1	05	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	BPBD Balangan	5 Paket	167.045.250	APBD		5 Paket	245.000.000
1	05	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	BPBD Balangan	3 Paket	21.930.950	APBD		4 Paket	49.000.000
1	05	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	BPBD Balangan	1 Paket	21.850.000	APBD		1 Paket	14.000.000
1	05	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi Konsultasi SKPD	jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BPBD Balangan	90 Laporan	45.848.000	APBD		90 Laporan	114.000.000
1	05	01	207	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1	05	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas atau operasional yang	BPBD Balangan	4 unit		APBD		12 Unit	360.000.000
1	05	01	207	03	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	BPBD Balangan	2 Unit	424,845,300	APBD		2 Unit	465.000.000
1	05	01	208	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1	05	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	BPBD Balangan	12 Laporan	274.363.492	APBD		12 Laporan	213.000.000
1	05	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	BPBD Balangan	12 Bulan	152.500.000	APBD		12 Bulan	137.000.000
1	05	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	BPBD Balangan	1 Laporan	60.448.080	APBD		1 Laporan	110.000.000
1	05	01	209	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1	05	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BPBD Balangan	24 Unit	272.022.000	APBD		35 Unit	318.000.000
1	05	01	209	05	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	BPBD Balangan	30 Unit	14.250.000	APBD		50 Unit	17.600.000
1	05	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	BPBD Balangan	1 Unit	0	APBD		2 Unit	184.000.000
1	05	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BPBD Balangan	2 Unit	389.071.656	APBD		3 Unit	152.000.000
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana										
1	05	03	201	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									
1	05	03	201	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	BPBD Balangan	1 Dokumen	109.999.850	APBD		1 Dokumen	120.000.000

1	05	03	2.01	02	Sosialisai, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	BPBD Balangan	1 200 orang	100.000.000	APBD		1500 orang	814.000.000
1	05	03	2.02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	BPBD Balangan	1 Paket	343.751.350	APBD		1 Paket	1.556.000.000
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	BPBD Balangan	1 Dokumen	1.740.523.700	APBD		1 Dokumen	70.000.000
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	BPBD Balangan	1 Dokumen	168.427.470	APBD		1 Dokumen	576.000.000
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	BPBD Balangan	40 orang	2.040.647.600	APBD		70 orang	1.370.000.000
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	BPBD Balangan	100 Orang	0	APBD		100 Orang	45.000.000
1	05	03	2.03										
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	BPBD Balangan	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	100.000.000
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD Balangan	100 Orang	280.596.640	APBD		150 Orang	560.000.000
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran										
1	05	04	2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah									
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	BPBD Balangan	20 Laporan	573.369.000	APBD		30 Laporan	1.110.000.000
1	05	04	2.04	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran									
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	BPBD Balangan	200 Orang	16.930.000	APBD		200 Orang	125.000.000

Analisis Dampak Sosial

Dalam dokumen RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki Visi “ Mewujudkan Kabupaten Balangan yang Aman dan Nyaman Melalui Pencegahan dan Penanganan Bencana yang Tanggap, Cepat dan Tepat” dan untuk mewujudkan hal tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki satu Program Utama Yaitu “**Program Penanggulangan Bencana Daerah**”

Penanggulangan dan mitigasi bencana merupakan suatu yang mutlak dan menjadi prioritas primer bagi setiap Negara, Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir beberapa Kabupaten/Kota di Wilayah NKRI banyak yang terkena Bencana Alam seperti Banjir, Tanah Longsor, Karhutla dan lain sebagainya, tentu saja hal ini banyak menimbulkan dampak yang mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat yang terkena bencana tersebut.

Dengan demikian Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mempunyai peran yang sangat penting dalam mengurangi dampak tersebut, berdasarkan hal tersebut maka BPBD melakukan upaya untuk Pengurangan Resiko Bencana (PRB), PRB harus di sosialisasikan kepada masyarakat. PRB sudah diperkuat dengan dikeluarkan undang-undang tentang penanggulangan Bencana. Oleh karena itu keberhasilan pemulihan ekonomi masyarakat dapat ditunjang dengan adanya program Penanggulangan Bencana baik itu faktor Alam ataupun Faktor Non Alam.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk priode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menuangkan langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi baik yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Rencana Kerja yang merupakan suatu proses yang mengarahkan para pemimpin Dinas beserta jajarannya dalam merealisasikan Visi dan Misi Bupati yang merupakan acuan dasar untuk pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan kebijakan pada tahun yang ditetapkan. Dengan demikian, Rencana Kerja bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan rencana di atasnya (Renstra PD, RKPD dan RPJMD Kabupaten Balangan) serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Sesuai dengan Realistis Kebutuhan Anggaran untuk pencapaian program-program yang ditetapkan yang dituangkan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yaitu untuk pemenuhan unsur kegiatan Rutin (administrasi dan operasional rutin), Kegiatan Operasional (Pemeliharaan dan Rehabilitasi) dan kegiatan untuk Investasi (pemenuhan Sarana dan Prasarana), Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana (sosialisasi), Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan (penyusunan rencana penanggulangan bencana, pelatihan, dan pengendalian bencana), Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban (penyediaan logistik, respon cepat, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban dan aktivasi system komando), Kegiatan penataan sistem dasar pananggulangan bencana (pengelolaan dan pemanfaatan system peananggulangan bencana).

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD

1.1 Program dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan untuk Meningkatkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana;
2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 3 program dan 12 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dan pendanaan dengan rincian sebagai berikut:

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (2022) (Rp.)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	100%	4.492.385.287

1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan Keuangan perangkat daerah yang disusun	5 Dokumen	152.121.112
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	152.121.112
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.810.835.347
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	2.765.092.787
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun	1 Dokumen	9.600.000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Semesteran	2 Dokumen	36.142.560
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mendapat Peningkatan Disiplin dan Kapasitas	100%	96.150.000
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan	46 stell	11.700.000
1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		0
1.3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	84.450.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	270.623.600
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Diadakan	12 bulan	13.949.400
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	5 Buah	167.045.250
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	21.930.950
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang Disediakan	12 Bulan	21.850.000

1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 kali	45.848.000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan yang diadakan	2 Buah	0
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan yang disediakan	0	0
1.5.2	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Diadakan	0	0
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	487.311.572
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	274.363.492
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	152.500.000
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.448.080
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pelayanan Jasa Perkantoran	100%	675.343.656
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 Bulan	272.022.000
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 Bulan	14.250.000
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	12 Bulan	0
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Bulan	389.071.656
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan	100%	3.133,422,610

2.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	20 Desa	209.999.850
2.1.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang dilegalisasi	40 Desa	109.999.850
2.1.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)secara tatap muka kepada Penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana Sesuai Jenis ancaman yang ada dikawasan tempat tinggal	40 Desa	100.000.000
2.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Panjang Bangunan Penahan Longsor Tebing yang Berfungsi	100%	2.642.826.120
2.2.1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas	1 Paket	343.751.350
2.2.2	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang mempunyai risiko Tinggi menimbulkan bencana	1 Dokumen	89.999.700
2.2.3	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Panjang Bangunan Penahan Longsor Tebing yang Berfungsi	100%	168.427.470
2.2.4	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	2 Kegiatan	2.040.647.600
2.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Paket	280.596.640
2.3.1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang	280.596.640

3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana dan Prosentase Desa Siaga Bencana	100%	590.299.000
3.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Kegiatan	573.369.000
3.1.1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/ kotqa	15 Kegiatan	573.369.000
3.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tersedianya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	200 Orang	16.930.000
3.2.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edkasi pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran	200 Orang	16.930.000

BAB IV PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan dengan perencanaan ketersediaan anggaran yang apabila tidak terpenuhi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana akan memakai ketersediaan anggaran Belanja Tidak Tetap (BTT) Pemerintah Kabupaten Malang tahun Tahun Anggaran 2022, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2022 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang. Dalam rangka mencapai target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, isi dokumen Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2022 sesuai dengan yang dicita-citakan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rancangan Akhir Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Akhir Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Balangan tahun 2022. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Demikian untuk dilaksanakan..